DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Metode Penyusunan	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	13
A. Teori Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	13
B. Asas Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	20
C. Kajian Praktik Empiris	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANGAN TERKAIT	25
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	26
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS	

DAN YURIDIS.....	30
A. Landasan Filosofis	30
B. Landasan Sosiologis	35
C. Landasan Yuridis	38
BAB V Ruang Lingkup, Sasaran Dan Jangkauan Dalam	
Peraturan Daerah	41
A. Ruang Lingkup, Sasaran Dan Jangkauan Yang Akan Dicapai	41
B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa	42
C. Materi yang Akan Diatur Dalam Qanun Ini Adalah Penormaan	44
BAB VI PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang secara konstitusional menganut bentuk Negara Kesatuan (*Unitary State*). Namun, ketika ditinjau dari sistem pemerintahan daerah, tampak bahwa Indonesia juga mengadopsi sejumlah prinsip federalisme, khususnya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini mencerminkan adanya kolaborasi yang unik antara prinsip negara kesatuan dan elemen desentralisasi, yang kian terlihat jelas sejak era reformasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dengan struktur pemerintahan yang bersusun tunggal. Ini berarti tidak terdapat entitas negara di dalam negara, seperti dalam sistem federal. Oleh karena itu, dalam sistem negara kesatuan, pelaksanaan pemerintahan pada dasarnya menjadi kewenangan utama pemerintah pusat.¹

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, terdiri atas ribuan pulau serta dihuni oleh berbagai suku, ras, dan budaya, menjadi tidak realistis jika seluruh urusan pemerintahan ditangani secara terpusat. Oleh karena itu, para pendiri bangsa menetapkan bentuk Negara Kesatuan yang

¹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, Cet. Kedua, 2005), hlm. 119.

disertai dengan pembagian wilayah ke dalam daerah besar dan kecil, dengan sistem pemerintahan daerah diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga memperhatikan prinsip musyawarah dalam sistem ketatanegaraan serta pengakuan terhadap hak-hak asal-usul pada daerah-daerah tertentu yang memiliki kekhususan.²

Dalam konteks perubahan zaman dan dinamika ketatanegaraan, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2002 membawa perubahan signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk pengaturan tentang pemerintahan daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Ayat (5) dan Pasal 18B. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan pemerintahan didistribusikan kepada daerah melalui pemberian otonomi atau pelimpahan wewenang agar daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri, baik melalui mekanisme desentralisasi maupun dekonsentrasi. Dengan demikian, daerah-daerah di Indonesia memperoleh kewenangan berdasarkan norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini berbeda dari sistem federal, di mana negara-negara bagian memiliki kedaulatan internal dan hanya menyerahkan urusan luar negeri serta pertahanan kepada

² Saldi Isra, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap sistim Ketatanegaraan Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Respublika Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* No.3 Vol.2, (Pekanbaru : Oktober 2002), hlm.18.

pemerintah federal melalui kesepakatan yang tercantum dalam konstitusi nasional.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Pernyataan ini mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, seluruh proses penyelenggaraan negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), dan tidak dapat dilandaskan semata-mata pada kehendak kekuasaan (*machtstaat*).⁴ Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada norma hukum yang sah dan berlaku dalam sistem hukum nasional. Sebagai implikasinya, segala bentuk tata kelola pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membawa dampak signifikan tidak hanya terhadap distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga terhadap sistem pengelolaan kepegawaian serta struktur organisasi perangkat daerah.⁵

³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, Cet. Pertama , 2006), hlm. 222.

⁴ Budiyo dan Rudy, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2014, hlm.10 .

⁵ Lintje Anna Marpaung, *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm 33-34.

Perubahan tersebut direspons melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menggantikan PP Nomor 41 Tahun 2007. Regulasi baru ini menegaskan kebutuhan untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. PP Nomor 18 Tahun 2016, yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 72 Tahun 2019, menetapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan ulang struktur dan jabatan organisasi perangkat daerah agar sesuai dengan kebutuhan riil serta potensi dan karakteristik daerah masing-masing, tanpa mengganggu kewenangan unit kerja organisasi yang memiliki otoritas pembentukan struktur kelembagaan.⁶

Pembentukan perangkat daerah didasarkan pada prinsip pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Urusan wajib sendiri dibedakan antara yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak. Sementara itu, urusan pilihan dapat dijalankan oleh daerah yang memiliki potensi khas dan keunggulan tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi

⁶ Faozan, Zulpikar Haris. Antara Harapan Dan Realita: Implementasi Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2010, 7.3: 07-07.

penggunaan sumber daya daerah dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷

Struktur organisasi perangkat daerah juga harus mengelola berbagai aspek manajerial, termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode kerja, serta fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam pembentukan organisasi tersebut, berbagai aspek seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kapasitas fiskal daerah, dan beban kerja turut diperhitungkan secara proporsional. Selanjutnya, penataan organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan kerangka regulasi serta kebutuhan objektif dan kondisi strategis daerah. Proses penataan ini juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, sebagai dasar hukum dalam melakukan reformasi birokrasi yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.⁸

Regulasi ini memberikan arahan yang komprehensif bagi daerah dalam menyusun organisasi yang efisien dan responsif. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan serius, seperti tumpang tindih urusan antarperangkat daerah dan struktur organisasi yang cenderung gemuk. Hal ini berdampak pada pembengkakan anggaran untuk pembiayaan aparatur, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik secara

⁷ Moenta Pangerang and Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Makassar (Depok, 2017).

⁸ Pradana, S. A. Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)*, 2023, 12.2: 422-439.

optimal. Meskipun PP Nomor 18 Tahun 2016 bertujuan untuk menyalurkan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, penerapannya dianggap belum sepenuhnya mempertimbangkan keragaman kondisi dan kapasitas masing-masing daerah.⁹ Oleh karena itu, meskipun regulasi ini membawa semangat penyederhanaan birokrasi, penyesuaian tetap diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan lokal.

Penataan kelembagaan di tingkat daerah memiliki urgensi yang tinggi guna menciptakan struktur organisasi yang adaptif terhadap perubahan, baik internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan pendekatan teori sistem dalam perspektif modern yang menekankan pentingnya struktur kelembagaan yang ramping namun memiliki kapasitas fungsi yang tinggi. Keberhasilan penataan organisasi perangkat daerah tidak semata-mata ditentukan oleh ukuran kelembagaan yang dibentuk, melainkan oleh sejauh mana kelembagaan tersebut memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Keragaman karakteristik antar daerah menjadi salah satu alasan utama pentingnya desain kelembagaan yang responsif terhadap konteks lokal. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, dinamika sosial-budaya, agama,

⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

serta kondisi geografis masing-masing. Faktor-faktor tersebut secara sosiologis membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat setempat, dan menjadi bagian integral dari konstruksi identitas suatu daerah dalam perjalanan sejarah bangsa. Hal ini juga tercermin pada Provinsi Aceh.¹⁰

Terletak di ujung barat Pulau Sumatera, Aceh menampilkan kekhasan tersendiri yang membedakannya dari daerah lain. Dari segi demografi, wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis yang, dalam catatan sejarah, pernah membentuk suatu entitas politik yang kuat dan berpengaruh. Seiring perkembangan negara, entitas tersebut kini bertransformasi menjadi bagian dari keragaman suku bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur pemerintahan di Aceh berlandaskan pada prinsip desentralisasi, yang berada dalam kerangka hak istimewa untuk menentukan arah pembangunan dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal. Kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Aceh dimaksudkan agar daerah tersebut dapat mengatur urusan internalnya sesuai dengan nilai, aspirasi, dan kepentingan lokal. Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan otonomi khusus tersebut, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana khusus kepada Provinsi Aceh.¹¹

¹⁰ Zainal, Suadi. Keistimewaan Aceh dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 2022, 16.1.

¹¹ Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh. *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, 2021. 2(1), 361.

Dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat Daya, serta kompleksitas tata kelola pemerintahan yang menuntut responsivitas kelembagaan terhadap perubahan lingkungan strategis, maka penyusunan Qanun tentang Perangkat Daerah menjadi suatu kebutuhan yang bersifat urgen dan fundamental. Qanun tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang dirancang untuk memberikan kerangka normatif dan struktural dalam pembentukan serta penataan organisasi perangkat daerah secara sistematis dan proporsional.

Keberadaan Qanun ini diharapkan mampu menghadirkan struktur organisasi pemerintahan daerah yang adaptif, yakni struktur yang tidak hanya bersifat statis atau administratif semata, melainkan mampu merespons perubahan kebijakan nasional, kebutuhan riil masyarakat, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Adaptabilitas tersebut penting guna memastikan bahwa setiap unit kerja dalam lingkup pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsi dan peran secara optimal, selaras dengan dinamika pembangunan yang terjadi di daerah. Lebih lanjut, penyusunan Qanun ini juga diarahkan untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efisiensi dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisasi beban anggaran yang bersifat konsumtif, terutama dalam hal pembiayaan struktur birokrasi yang terlalu besar dan tidak proporsional. Sementara itu, efektivitas mengacu pada kemampuan organisasi perangkat daerah dalam

menjalankan fungsi pelayanan publik secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan Qanun Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya menjadi manifestasi dari kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh negara, tetapi juga merupakan bentuk konkret dari komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyusunan regulasi ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan organisasi pemerintahan daerah yang lebih ramping namun kaya fungsi, responsif terhadap perubahan, serta akuntabel dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam naskah akademis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah?

3. Bagaimana ruang lingkup, sasaran dan jangkauan dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Perangkat Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah.
2. Merumuskan Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah.
3. Merumuskan ruang lingkup, sasaran dan jangkauan dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perangkat Daerah.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (*legal research*) umumnya berfokus pada kajian terhadap dokumen-dokumen hukum. Pendekatan ini mengandalkan bahan hukum sebagai sumber utama, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau akad, teori-teori hukum, serta pandangan dari para ahli hukum. Penelitian jenis ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dan sering disamakan dengan studi kepustakaan atau analisis dokumen.¹² Disebut doktrinal karena kajiannya terbatas pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku dan tidak mencakup data empiris dari lapangan.

Peter Mahmud Marzuki turut mengemukakan konsep penelitian hukum empiris, yang ia istilahkan sebagai *socio-legal research* atau penelitian sosio-legal. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu gejala sosial, di mana hukum dipahami dari sisi eksternalnya dan selalu dikaitkan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam kerangka ini, fokus utama penelitian diarahkan pada perilaku individu maupun kelompok sosial dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum.¹³

Penelitian hukum empiris sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menelaah hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik, yakni dengan mengamati bagaimana hukum bekerja secara konkret dalam

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006. hlm.87.

masyarakat. Karena objek kajian melibatkan relasi antarindividu dalam kehidupan sosial, maka pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian, penelitian hukum empiris bertumpu pada data dan fakta yang diperoleh langsung dari masyarakat, lembaga hukum, maupun institusi pemerintahan.

Pendekatan yuridis normatif dalam kajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan fokus utama pada penelaahan data sekunder, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, kajian akademik, serta referensi lainnya yang relevan terkait Jabatan Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji data sekunder yang dihimpun dari lembaga pemerintahan maupun sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dimaksud. Proses penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan oleh tim penyusun yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang penyusunan naskah akademik, dengan latar belakang keilmuan di bidang pemerintahan, hukum, dan kebijakan publik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Teori Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Perkembangan demokratisasi dalam ranah politik dan tata kelola pemerintahan pada masa kini tidak semata-mata menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme serta kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih dari itu, terdapat tuntutan mendasar bagi terwujudnya tata pemerintahan yang menjunjung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana yang dicita-citakan dalam konsep *good governance* dan *clean government*.¹⁴

Konsep *governance* merujuk pada seperangkat mekanisme, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah bersama warga negara dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan berbagai persoalan publik. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya aktor utama, melainkan menjadi salah satu dari sekian banyak pelaku yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Peran tradisional pemerintah sebagai motor pembangunan dan penyedia layanan publik mengalami pergeseran menuju fungsi fasilitator yang menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktor-aktor lain di dalam

¹⁴ Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012). hlm 2.

masyarakat. Dengan demikian, *governance* mensyaratkan adanya peninjauan kembali terhadap fungsi negara, yang pada gilirannya juga menuntut redefinisi terhadap peran warga negara. Hal ini tercermin dari meningkatnya ekspektasi terhadap partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Dalam dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)*, *good governance* dijabarkan melalui sejumlah karakteristik utama:

1. Penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, serta menjunjung efektivitas dan keadilan.
2. Prinsip supremasi hukum harus dijamin dan ditegakkan secara konsisten dalam setiap proses pemerintahan.
3. Arah kebijakan politik, sosial, dan ekonomi seyogianya disusun berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus masyarakat.
4. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan perlu memperhatikan secara serius kepentingan kelompok masyarakat yang paling lemah dan miskin, agar tidak terpinggirkan dari proses pembangunan.¹⁶

¹⁵ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 1-2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 3.

Selanjutnya, dalam konteks pemerintahan demokratis masa kini, ditekankan pentingnya membangun mekanisme pengambilan keputusan publik yang peka terhadap suara-suara komunitas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari model pengambilan keputusan yang bersifat hierarkis menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penentuan kebijakan.

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Komitmen tersebut secara tegas tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagai bentuk implementasi lebih lanjut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun modul baru guna mendukung sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Modul tersebut diawali dengan penguatan pemahaman terhadap konsep *good governance*, yang telah diperkenalkan secara luas di berbagai instansi pemerintahan, serta didukung oleh peran aktif lembaga non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan institusi pendidikan tinggi.¹⁷

¹⁷ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, hlm 6.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan faktor lingkungan eksternal tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penerapan prinsip *good governance* dengan kinerja unit pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pola budaya organisasi yang diterapkan di Kantor Kecamatan Kota Bandung belum selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, sebagian aparatur kecamatan belum menjadikan dinamika lingkungan eksternal sebagai bagian dari pertimbangan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini turut menjelaskan mengapa penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah tersebut masih belum mencapai tingkat optimal.¹⁸

Sebagai respons terhadap tuntutan nasional serta dinamika global dalam mewujudkan *Good Governance*, dibutuhkan aparatur negara yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diemban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Upaya untuk membentuk sumber daya aparatur yang kompeten tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas profesionalisme, penguatan sikap pengabdian dan loyalitas terhadap cita-cita bangsa dan negara, penanaman semangat persatuan dan kesatuan, serta perluasan wawasan para pegawai negeri sipil. Salah satu instrumen strategis dalam proses ini adalah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan, yang merupakan

¹⁸ Muhammad Dahlan, Asep Sumaryana, Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pelayan Publik, Budaya Organisasi dan Lingkungan Eksternal Sebagai Pemoderasi, *Jurnal: Sosiohumaniora*, Volume 19 Nomor 1, Maret 2017, h. 50

bagian integral dari sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh dan berbasis pada standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan.¹⁹

Gagasan *good governance* kini telah menempati posisi strategis dalam diskursus reformasi birokrasi dan arah pembangunan masa depan. Hal ini disebabkan oleh peran penting prinsip-prinsip *good governance* dalam menyediakan kerangka kerja dan pedoman yang memungkinkan terciptanya keseimbangan kepentingan di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), terdapat sembilan elemen kunci yang menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya orang tua dalam dunia pendidikan, menjadi faktor krusial dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Tanpa kehadiran partisipatif dari pihak keluarga, pendidik dan pengawas pendidikan akan menghadapi hambatan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, terlebih di tengah tantangan moral dan sosial yang kian kompleks.

¹⁹ Sedarmayanti, *Good Governance ...*, hlm 10.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pendidikan yang tertib dan teratur sangat bergantung pada keberadaan aturan hukum yang ditegakkan secara konsisten. Hukum tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, melainkan menjadi perangkat normatif untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi kelembagaan dijalankan secara optimal dan bertanggung jawab.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari pengambilan kebijakan hingga pengelolaan anggaran. Kurangnya keterbukaan, terutama dari pengawas atau manajer kepada bawahannya, berpotensi menimbulkan konflik internal dan merusak keharmonisan organisasi.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Salah satu ciri dari tata kelola yang baik adalah adanya kepekaan dan tanggapan cepat terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Pimpinan lembaga pendidikan atau instansi publik dituntut untuk tidak bersikap pasif, melainkan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan

aspirasi bawahannya secara proaktif guna merumuskan kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan bersama.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pengambilan keputusan yang melibatkan musyawarah serta upaya mencapai mufakat merupakan elemen penting dalam memastikan legitimasi dan keberterimaan kebijakan di lingkungan kelembagaan. Keputusan yang lahir dari kesepakatan kolektif memiliki daya ikat yang lebih kuat serta mendukung terciptanya stabilitas internal.

6. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*)

Dalam lingkungan organisasi yang plural, baik dari segi etnis, agama, maupun budaya, prinsip keadilan dan kesetaraan harus ditegakkan. Seluruh anggota organisasi memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, guna menghindari timbulnya ketimpangan dan ketidakpuasan.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Kualitas pemerintahan dan pelayanan publik ditentukan oleh seberapa efektif dan efisien kebijakan dijalankan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran

secara luas, sedangkan efisiensi terkait dengan penggunaan sumber daya yang rasional dan tepat guna.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menuntut setiap pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan wewenang dan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab tersebut mencakup kebijakan, tindakan, serta sikap netralitas dalam menjalankan fungsi kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan harus memiliki visi jauh ke depan, khususnya dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang bersifat dinamis dan tidak terduga. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat dan terukur agar kebijakan yang diambil mampu merespons tantangan masa depan secara adaptif dan progresif.²⁰

B. Asas Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa wilayah Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten dan kota. Masing-masing satuan pemerintahan tersebut memiliki otoritas

²⁰ Ibid., hlm 182.

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan ini, pelaksanaan pemerintahan daerah diselenggarakan atas dasar prinsip otonomi seluas-luasnya, dengan pengecualian terhadap urusan pemerintahan yang secara eksplisit ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, baik dalam kerangka pelaksanaan asas otonomi maupun tugas pembantuan. Tujuan utama dari otonomi yang luas ini adalah mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta perluasan partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi, prinsip keadilan dan pemerataan, serta menghargai karakteristik keistimewaan dan kekhususan masing-masing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks negara kesatuan, relasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan isu yang penting untuk dikaji, mengingat dalam praktiknya sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Hal ini tidak dapat dihindarkan karena dalam sistem negara kesatuan, penguasaan otoritas pemerintahan secara prinsip berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada daerah bersifat terbatas dan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.²¹

C. Kajian Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Salah satu wilayah administratif yang berada dalam lingkup Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96°34'57"-97°09'19" Bujur Timur dan 3°34'24"-4°05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dan sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 1.

188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.²²

Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat 155 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan wilayah ini tercatat lebih rendah. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka 0,91%. Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Aceh, Kabupaten ini berada di urutan ke-17, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten ini di urutan 125.²³ Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tergolong rendah, yaitu sekitar 54 jiwa per kilometer persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Aceh yang mencapai 78 jiwa per kilometer persegi Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada perbedaan kepadatan penduduk antar kecamatan di Abdya, dengan beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih tinggi dari yang lain.²⁴

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Aceh Barat Daya tidak begitu tinggi dari tahun ketahun. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga merupakan masalah yang sering terkait dengan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas ekonomi suatu wilayah,

²² <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 21 Juli 2025.

²³ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 21 Juli 2025.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 21 Juli 2025.

sumber daya yang ada akan semakin terpenuhi, menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan peluang kerja.²⁵ Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh, menurut data yang didapatkan dari BPS Aceh Barat Daya tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya masih terlalu tinggi yaitu mencapai angka 15%.²⁶ Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong dengan kode pos 23762-23767 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh Suku Aceh (80%) diikuti oleh Suku Aneuk Jamee (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%).²⁷

²⁵ Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,

²⁶ BPS Aceh Barat Daya

²⁷ <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 21 Juli 2025.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini menyajikan hasil telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi hukum aktual mengenai Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kajian ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, baik secara vertikal antar jenjang peraturan, maupun secara horizontal antar instrumen hukum yang setingkat. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi status keberlakuan peraturan yang dimaksud, apakah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih berlaku, atau memerlukan penyesuaian.

Evaluasi terhadap regulasi yang dilakukan akan difokuskan pada ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk dan menyusun struktur perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Lebih jauh, pembahasan ini akan mengkaji ketentuan dalam peraturan pemerintah maupun peraturan pelaksana lainnya yang secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang, khususnya yang memuat mandat dan pengaturan mengenai perangkat daerah.

Menurut pandangan Hans Kelsen, sistem hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma-norma hukum tersusun secara bertingkat dan saling terkait dalam satu struktur sistematis. Dalam struktur ini, setiap norma hukum yang berada pada

tingkat yang lebih rendah memperoleh keberlakuan, legitimasi, dan dasar pembenarannya dari norma yang berada pada tingkatan di atasnya. Proses ini berlangsung secara berlapis hingga mencapai norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut asal-usulnya secara hukum, yang oleh Kelsen disebut sebagai *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotetis dan fiktif.²⁸

Dengan demikian, eksistensi dan keberlakuan norma hukum tingkat bawah ditentukan oleh keberadaan norma hukum di atasnya. Semakin tinggi posisi suatu norma dalam hierarki tersebut, semakin abstrak pula kandungannya; sebaliknya, norma yang terletak pada tingkatan lebih rendah akan bersifat lebih konkret. *Grundnorm* sebagai norma paling fundamental menempati posisi puncak dalam tatanan hukum tersebut dan menjadi sumber legitimasi seluruh norma di bawahnya.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dipahami bahwa bentuk negara kesatuan merupakan dasar konstitusional bagi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Amandemen terhadap Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 mengarahkan pada pembaruan format dan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁹

²⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta, 2010, hlm. 28.

²⁹ Said, Abdul Rauf Alauddin, “Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat – Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD1945”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015. 9 (4): 577-602, h.579

Perubahan Pasal 18, misalnya, memperjelas bentuk pembagian wilayah administratif di Indonesia, dengan penggunaan frasa "dibagi atas" alih-alih "terdiri atas", yang menegaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon,³⁰

Ketentuan dalam Pasal 18 mencerminkan sejumlah prinsip utama, antara lain: prinsip hierarki pembagian wilayah (ayat 1), prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan (ayat 2), prinsip demokratisasi (ayat 3 dan 4), serta prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah (ayat 5). Pasal 18A mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencakup aspek kewenangan (ayat 1) dan aspek keuangan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya (ayat 2). Sementara itu, Pasal 18B mengandung prinsip pengakuan terhadap daerah-daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Dalam praktiknya, otonomi daerah idealnya dijalankan secara fleksibel, dengan mempertimbangkan kapasitas, karakteristik, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Negara Indonesia yang berbentuk kesatuan dan bercorak republik, menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi. Prinsip ini melandasi mekanisme penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut

³⁰ Hadjon, Philipus M , *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan*, disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya,2004. hlm. 1-3.

merupakan bagian dari pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi. Bagir Manan menegaskan bahwa³¹;

Pasal 18 ayat (2) mengandung prinsip bahwa daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dalam kerangka otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan daerah adalah sistem pemerintahan otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak terdapat pemerintahan daerah yang terpisah dari sistem negara, melainkan hanya ada pemerintahan daerah otonom yang menjalankan kewenangan berdasarkan pendelegasian dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pembentukan pemerintahan daerah diarahkan sebagai satuan pemerintahan lokal yang bersifat mandiri dan demokratis.

Implikasi dari penerapan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 adalah bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi tanggung jawab daerah tersebut sebagai bagian dari "rumah tangga" pemerintahan lokal. Dalam konteks negara kesatuan, kedaulatan tetap berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan pandangan C.F. Strong³² yang menyatakan bahwa esensi dari negara kesatuan adalah kedaulatan yang tidak terbagi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, dan tidak terdapat badan legislatif lain selain yang ditentukan oleh konstitusi pusat.

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik,

³¹ Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Faluktas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004, hlm 8.

³² Strong, C. F. *Modern Political Constitutions an Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, London: Fith Printed, Sidwick & Jackson Limited, 1960. hlm 80.

pemberdayaan masyarakat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, upaya ini juga ditujukan untuk memperkuat daya saing daerah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi, prinsip keadilan, pemerataan, dan kekhasan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan yang diserahkan kepada daerah harus disertai dengan pendanaan yang memadai, serta pengalihan sarana prasarana dan sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan.³³

Adapun urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga wajib disertai dengan alokasi pendanaan yang sesuai dalam kerangka dekonsentrasi. Dalam pelaksanaannya, daerah diberikan ruang untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan tersebut melalui berbagai mekanisme, baik desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Berdasarkan sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan

³³ LEKIPIOUW, Sherlock Halmes. Konstruksi penataan daerah dan model pembagian urusan pemerintahan. *Sasi*, 2020, 26.4: 557-570.

arahan khusus mengenai pembentukan dan struktur organisasi Perangkat Daerah yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan bahwa "Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda."

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengeluarkan Peraturan Daerah atau Qanun sebelumnya, yakni Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, seluruh substansi dan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tetap dijadikan sebagai acuan utama dalam proses penyusunan rancangan perubahan Peraturan Daerah ini, selama relevan dan dapat diadaptasikan dengan kebutuhan spesifik yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan landasan ideologis dan filosofis yang mendasari prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Prinsip tersebut menekankan pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar bagi penerapan supremasi hukum dalam negara, yang secara tegas berakar pada falsafah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi warga negara merupakan manifestasi penghormatan terhadap martabat manusia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai fondasi negara hukum.³⁴

Landasan filosofis merupakan salah satu dasar fundamental dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan. Ia berfungsi sebagai pijakan normatif yang merefleksikan pandangan hidup, kesadaran kolektif, serta cita-cita hukum yang tumbuh dan berkembang dalam konteks sosio-kultural suatu bangsa. Di Indonesia, filosofi dasar tersebut diwujudkan dalam ideologi Pancasila yang berperan sebagai norma dasar (Groundnorm) dalam pembentukan hukum nasional.

³⁴ Abdillah, Ibnu, Et Al. Pancasila Sebagai Pedoman Dasar Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2024, 5.2: 57-63.

Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai fundamental yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai yang hidup dan mengakar dalam tradisi serta budaya bangsa. Dengan demikian, Pancasila menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum nasional.³⁵

Menurut teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap norma hukum memiliki struktur bertingkat, di mana norma yang lebih rendah harus berlandaskan dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Pancasila menempati puncak struktur norma hukum di Indonesia, dan seluruh ketentuan dalam Pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 secara inheren memuat nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antar satu sila dengan sila lainnya. Kesatuan nilai tersebut merefleksikan hakikat kehidupan manusia Indonesia yang bertumpu pada tiga dimensi hubungan kodrati: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama (termasuk dengan dirinya sendiri), serta hubungan manusia dengan alam dan benda-benda di sekitarnya, baik yang bersifat fisik maupun biologis.³⁶

Dalam ranah hukum, pelaksanaan perizinan didasarkan pada pendekatan teori negara hukum modern, yang mengintegrasikan prinsip-

³⁵ Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2022, hlm. 19.

³⁶ Sunaryo Wreksosuharjo, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Andi, Yogyakarta. 2024 hlm. 37 .

prinsip dari konsep *rechstaat* (negara hukum) dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara hukum menuntut agar seluruh aktivitas pemerintahan, termasuk tindakan-tindakan yang bersifat kenegaraan, dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara di berbagai aspek kehidupan, mencakup bidang sipil, politik, sosial, hingga ekonomi.³⁷ Dengan demikian, seluruh tindakan administratif dalam konteks kenegaraan sejatinya merupakan manifestasi dari fungsi pelayanan publik oleh negara, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan prinsip negara kesejahteraan, peran negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi utama. Pertama, negara bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap seluruh penduduk dalam batas wilayah yurisdiksinya. Kedua, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan atau mendukung terselenggaranya layanan publik yang mencakup bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, dalam situasi konflik sosial, negara berperan sebagai pihak netral yang bertindak sebagai mediator, sekaligus memastikan tersedianya sistem peradilan yang menjamin keadilan mendasar dalam relasi-relasi kemasyarakatan.

Pelayanan publik merupakan bagian dari fungsi kedua, di mana negara berkewajiban menyediakan berbagai bentuk layanan dasar, antara lain layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, fasilitas

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

komunikasi dan pos, bantuan sosial, pembinaan kebudayaan, serta beragam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan utama dari penyediaan layanan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap anggota masyarakat dapat hidup secara layak dan terbebas dari jerat kemiskinan maupun ketergantungan ekonomi yang berlebihan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan publik juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus dan kekhususan masing-masing daerah.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa wilayah negara terdiri atas provinsi-provinsi, yang masing-masing dibagi lagi ke dalam kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan-urusan tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kewenangan pemerintah pusat.³⁸

Dalam konteks tersebut, desentralisasi menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan telah diterima secara luas dalam praktik administrasi negara. Desentralisasi dipandang sebagai solusi atas keterbatasan pendekatan sentralistik, terutama dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang kompleks,

³⁸ Franz Magnis Suseno, dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 1.

heterogenitas sosial budaya lokal, serta meningkatnya aspirasi demokratis dalam tata kelola pemerintahan.³⁹

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan akuntabel, diperlukan penerapan sistem akuntabilitas yang komprehensif, transparan, dan tepat sasaran dalam tubuh birokrasi. Hal ini memungkinkan terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, serta bertanggung jawab. Setiap lembaga pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam kajian ini, peneliti memandang bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih memiliki nilai filosofis yang signifikan, karena memuat aspirasi, tujuan, dan cita-cita dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, secara teoritis digunakan pendekatan *logic model* sebagai kerangka analisis untuk mengkaji visi dan misi tersebut, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dalam proses pencapaian tujuan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai dasar pertimbangan yang mencerminkan bahwa suatu regulasi dibentuk guna menjawab kebutuhan nyata masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan. Aspek ini berkaitan erat dengan kondisi empiris yang mencerminkan dinamika sosial, perubahan

³⁹ Ibid.

kebutuhan masyarakat, serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara dan warganya pada suatu waktu tertentu.

Secara sosiologis, Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Aceh yang secara geografis terletak di bagian barat dan memiliki karakteristik sosial yang cukup beragam. Sebagai salah satu dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, wilayah ini tidak hanya terhubung secara strategis dengan koridor barat Sumatra, tetapi juga berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, menjadi muara dari sejumlah sungai besar, serta memiliki kontur wilayah yang fluktuatif. Keberagaman masyarakatnya serta posisi geografis yang cukup kompleks memberikan pengaruh signifikan terhadap kebutuhan regulatif yang sesuai dengan kondisi lokal.⁴⁰

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya, kebutuhan akan pembentukan perangkat daerah yang andal, efektif, dan responsif merupakan suatu keharusan. Hal ini didorong oleh kompleksitas kondisi sosial-budaya yang heterogen, tantangan geografis yang bervariasi, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu, struktur birokrasi daerah dituntut untuk tidak hanya memiliki fungsi administratif semata, tetapi juga mampu menyesuaikan diri secara kontekstual dengan kondisi lokal.

Perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak implementasi kebijakan publik. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga

⁴⁰ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis> , di akses pada 27 Juli 2025.

ini harus mampu mengartikulasikan regulasi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat menjadi program-program nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung. Ketidaksiuaian antara struktur kelembagaan dengan kebutuhan aktual masyarakat, atau ketidakmampuan dalam merespons tantangan geografis yang dihadapi, berpotensi menimbulkan ketimpangan antara perencanaan kebijakan dan hasil pelaksanaannya.

Keberadaan perangkat daerah yang profesional dan memiliki kapasitas institusional yang memadai menjadi prasyarat penting dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Kinerja kelembagaan yang baik tidak hanya akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan inklusif.

Dengan memperhatikan keragaman sosial dan kondisi geografis yang menantang di Kabupaten Aceh Barat Daya, pendekatan sosiologis menjadi fondasi rasional dalam perumusan Qanun mengenai perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa struktur kelembagaan pemerintahan daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara efektif, mendukung pemerataan pembangunan, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada prinsip partisipasi dan orientasi terhadap kepentingan publik. Apabila dimensi sosiologis ini diabaikan, maka kebijakan kelembagaan yang dibentuk berpotensi tidak

relevan dengan konteks sosial setempat dan tidak mampu menjawab tantangan riil yang dihadapi masyarakat daerah.

C. Landasan Yuridis

Dalam kerangka asas pembentukan perundang-undangan, khususnya asas hierarki, setiap peraturan memiliki tingkatan yang harus dihormati. Artinya, Peraturan Daerah sebagai produk hukum di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di atasnya secara struktural. Selain itu, keselarasan (harmonisasi) dan kesesuaian (sinkronisasi) dengan peraturan yang sederajat juga harus menjadi perhatian utama, guna menghindari tumpang tindih atau konflik antar norma hukum.

Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam sistem hukum nasional, sehingga setiap tingkatan peraturan memuat muatan materi yang selaras dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Dalam konteks keberlakuan yuridis (*juridische gelding*), terdapat beberapa syarat utama agar suatu peraturan dapat diberlakukan secara sah. Pertama, peraturan harus dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan secara hukum. Kedua, bentuk dan jenis peraturan harus sesuai dengan substansi materi yang diatur. Ketiga, proses penyusunannya harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Keempat, isi peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Selain prinsip-prinsip tersebut, terdapat pula sejumlah asas penting yang menjadi fondasi yuridis dalam penyusunan peraturan, antara lain:

1. Lex Superior Derogat Legi Inferiori – peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah;
2. Lex Specialis Derogat Legi Generali – peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum;
3. Lex Posterior Derogat Legi Priori – peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lebih lama;
4. Delegata Potestas Non Potest Delegari – kewenangan yang telah didelegasikan tidak dapat didelegasikan kembali tanpa izin dari pemberi wewenang.⁴¹

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang meninjau berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta sistem hukum positif yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat. Secara normatif, setiap Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem norma hukum yang saling berhubungan, di mana satu norma menunjuk dan bergantung pada norma lainnya. Sistem ini tersusun dalam bentuk hierarki hukum, di mana norma-norma hukum yang bersifat khusus berlandaskan pada norma-norma hukum yang bersifat umum.

⁴¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/> . diakses pada 27 Juli 2025.

Landasan yuridis merupakan dasar pertimbangan normatif dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Pertimbangan ini disusun dengan mengacu pada ketentuan hukum yang telah berlaku, yang direncanakan untuk diubah, atau yang akan dicabut, demi menjamin kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Yang menjadi landasna yuridis dari Rancangan Peraturan daerah terkait Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Qanun tentang Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

Bab V

Ruang Lingkup, Sasaran Dan Jangkauan Dalam Peraturan Daerah

A. Ruang Lingkup, Sasaran Dan Jangkauan Yang Akan Dicapai

Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perangkat daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki ruang lingkup yang mencakup pengaturan struktur organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah, serta tata kelola pemerintahan daerah. Perda ini bertujuan untuk membentuk struktur pemerintahan yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, dengan memastikan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran utama dari Perda ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui penyusunan perangkat daerah yang terstruktur, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun umpan balik terhadap kebijakan yang ada.

Jangkauan dari Perda ini tidak hanya mencakup seluruh perangkat daerah, seperti Dinas dan Badan, yang harus melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya, tetapi juga memberikan dampak langsung pada masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perda ini juga berperan dalam pengelolaan anggaran daerah yang lebih terstruktur dan mengatur

hubungan koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif.

B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah

kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.

C. Materi yang Akan Diatur Dalam Qanun Ini Adalah Penormaan

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Perangkat Daerah meliputi hal-hal berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Perangkat Daerah.

BAB II ASAS

Bab ini mengatur tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten dilakukan berdasarkan asas.

BAB III PEMBENTUKAN

Bab ini mengatur tentang pembentukan beberapa instansi pemerintahan yang dibentuk melalui Peraturan ini.

BAB III SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN

Bab ini mengatur tentang Susunan perangkat kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IV PEMBENTUKAN UPTD

Bab ini mengatur tentang pembentukan UPTD yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dari dinas atau badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai klasifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V STAF AHLI

Bab ini mengatur tentang staf ahli yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bab ini mengatur tentang bahwa Pegawai pada perangkat kabupaten dan unit kerja di bawahnya diisi oleh pegawai ASN dan pegawai Non-ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini mengatur tentang ketentuan peralihan

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan inisiatif strategis yang memiliki signifikansi tinggi dalam upaya mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Raperda ini dirancang untuk membentuk struktur organisasi pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, serta menjamin adanya pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan berlandaskan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.

Pentingnya fondasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Raperda ini menjadi aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Pancasila, sebagai dasar ideologis negara, menjadi pijakan utama dalam menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, realitas sosial dan kebutuhan masyarakat lokal Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi acuan utama dalam merumuskan substansi pengaturan. Selanjutnya, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi turut menjadi pertimbangan krusial

guna memastikan legalitas dan keberlakuan normatif dari Raperda ini di dalam sistem hukum nasional.

B. Saran

Dalam rangka memperkuat implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perangkat daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pertama, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial yang harus diutamakan. Pemerintah daerah diharapkan dapat secara aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan hingga pelaksanaan Raperda, melalui forum diskusi publik, kegiatan sosialisasi, dan mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat.

Upaya ini penting untuk memastikan bahwa substansi regulasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil serta ekspektasi masyarakat. Kedua, perlunya dilakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi secara berkala agar tetap sejalan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Peninjauan regulasi ini bertujuan menjaga relevansi dan efektivitas Raperda dalam menghadapi dinamika kebijakan dan tantangan daerah yang terus berubah. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah, menjadi prioritas penting.

Melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi, diharapkan ASN dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai

dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya, penguatan koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi kebutuhan mendesak guna menghindari duplikasi kewenangan serta meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Terakhir, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan menjunjung tinggi kedua prinsip tersebut, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah akan meningkat, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ibnu, Et Al. Pancasila Sebagai Pedoman Dasar Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2024, 5.2: 57-63.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- BPS Aceh Barat Daya
- Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2014.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, Cet. Kedua, 2005).
- Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,
- Faozan, Zulpikar Haris. Antara Harapan Dan Realita: Implementasi Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2010, 7.3: 07-07.
- Franz Magnis Suseno, dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.
- Hadjon, Philipus M , *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan*, disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya,2004.

<https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya .

<https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>,.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/> .

<https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>.

LEKIPIOUW, Sherlock Halmes. Konstruksi penataan daerah dan model pembagian urusan pemerintahan. *Sasi*, 2020, 26.4: 557-570.

Lintje Anna Marpaung, Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Faluktas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta, 2010.

Moenta Pangerang and Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Makassar (Depok, 2017).

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, Cet.

Muhammad Dahlan, Asep Sumaryana, Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pelayan Publik, Budaya Organisasi dan Lingkungan Eksternal Sebagai Pemoderasi, *Jurnal: Sosiohumaniora*, Volume 19 Nomor 1, Maret 2017, h. 50

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Pradana, S. A. Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)*, 2023, 12.2: 422-439.

- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh. *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, 2021. 2(1), 361.
- Said, Abdul Rauf Alauddin, “Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat – Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD1945”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015. 9 (4): 577-602, h.579
- Saldi Isra, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap sistim Ketatanegaraan Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Respublika Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning No.3 Vol.2*, (Pekanbaru : Oktober 2002).
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2022, hlm. 19.
- Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” *Bagian Kedua Edisi revisi*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012).
- Strong, C. F. *Modern Political Constitutions an Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, London: Fith Printed, Sidwick & Jackson Limited, 1960.
- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Sunaryo Wreksosuharjo, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Applikatif*, Andi, Yogyakarta. 2024.
- Zainal, Suadi. Keistimewaan Aceh dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 2022, 16.1.